

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Black's Law Dictionary Eight Edition, 2004 United States of America: West.

Jacqueline Martin and Tony Storey, 2010, Unlocking Criminal Law, Hodder Education, London.

Kristiana, Yudi, 2015 *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Manullang Herlina Pasaribu dan Riki Yanto, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan.

Muladi dan Diah Sulistiyani, 2013 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni, Bandung.

Mufti, Muslim, 2013, *Teori-teori Demokrasi*. Pustaka Setia, Bandung.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurdjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Priyatno, Admaja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung.
- Qamar, Nurul, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Sjahdeini dan Sutan Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, P.T Pustaka Umum Grafiti, Jakarta.
- Sjahdeini dan Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah F, 2015 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Wiyono, R, 2012 *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Media, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh

Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Karya Ilmiah

Awarman, Aditya , 2018, *Peran Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jurnal Ilmiah Moderat, Vol. 4. No. 2, <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1481>.

Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, 2018, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik Di Indonesia*, Integritas: Jurnal Anti Korupsi Vol. 7 No. 1 DOI: 10.32697/integritas.v7i1.729.

Ahmad Rifa'i dan Sri Kusriyah, 2017, *Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 2 No. 4.

Butar-butur, Russel, 2016 “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2. DOI: 10.22304/pjih.v3n2.a7

Denny Latumaerissa dan Judy Marria Saimima, 2020 “*Pertanggungjawaban Pidana Partai politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Masohi, Vol 3, No. 1, DOI: <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/354>

Toruan, Henry Donald Lbn, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi*, jurnal Rechtsvinding, Vol 3, No. 3, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v3i3.33.

Marthin Simangunsong dan Sihol Marito Siregar, 2021 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa*, *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, Vol. 2 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.387>.

Wangga, Maria Silvy E, 2018 “*Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*” *Integritas: Antikorupsi*, Vol. 4, No. 2, <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.179>.

Ihham dan Maya Hildawati, 2019, “*Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap PEMENUHAN HAK PENCARI KEADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)*”, *Jurnal Hukum Acara*, Vol. 7, No.3.

Maglie, Cristina, 2005 *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4 No. 3, DOI: https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol4/iss3/4

Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa, 2019, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12, No. 1

Setyawan, Vincentius Patria, 2019, “*Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *Justitia Et Pax*, Vol. 25 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2070>

Suhariyanto, Budi, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7, No. 2, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.198.

Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, dan Muhammad Arif Fauzi, 2016 *Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3. DOI: <https://onsearch.id/Record/IOS231.article-12380>

Mochtar, Zainal Arifin, 2019, *Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>

Sumber Lainnya

a. Terbitan Lembaga/organisasi

Indonesia Corruption Watch, 2021, *Tren Vonis Korupsi 2020, Koruptor Merajarela Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera*, hal 15

Laporan Tahunan KPK, 2020, hal 102.

b. Website/Internet

Komisi Pemberantasan Korupsi, Perlu Penegakan Hukum Tegas untuk Partai Politik yang Korup, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1938-perlu-penegakan-hukum-tegas-untuk-partai-politik-yang-korup>,

diakses pada tanggal 18 Juli 2021

Rzk, Uang Pengganti (2): *Eksekusi dan Masalah Tanggung Renteng*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol14214/uang-pengganti-2--eksekusi-dan-masalah-tanggung-renteng>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021